

PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM

Junita Marlina Manurung¹, Timbul Dompok²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam
email: pb171010051@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the impact Pandemic Covid-19 of March, 2019 in Indonesia. Covid-19 has had an impact on the employment sector. Researcher describe the role of the Batam City Manpower Office in an effort to overcome the unemployment rate in Batam City. The role of the Batam City Manpower Office is to make policies, implement programs to increase workforce competence, facilitate public access to job information, and provide training to the community to become young entrepreneurs. Map out the factors that influence the role of Manpower Office in carrying out its duties and functions. The type of research approach used by the researcher is a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the Batam City Manpower Office has attempted to overcome unemployment during the Covid-19 pandemic through policy programs even though its implementation has limited human resources and budget constraints. The Batam City Manpower Office has the responsibility to carry out training programs properly in order to produce quality, productive, effective and efficient workers so that they can compete with the industrial and business world.

Keywords : Batam City Manpower Office, Role, Manpower, Covid-19.

PENDAHULUAN

Indonesia yakni salah satu negara berkembang dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Menurut data BPS, sepanjang kurun waktu 2010 – 2020 pertumbuhan penduduk Indonesia lajunya mencapai 1,25% per tahun. Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia dikarenakan migrasi, kematian, dan kelahiran. Penduduk Indonesia menurut data tersebut sebanyak 270, 20 juta jiwa di tahun 2019-2020, sebanyak 91,32% atau sekira 246,74 juta penduduk punya domisili yang selaras dengan Kartu Keluarga (KK), dan sisanya yakni 8,68% atau kira kira 23,407 juta penduduk domisilinya tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). (BPS 2021)

Penduduk adalah mereka yang sudah Dengan jumlah penduduk yang besar, lapangan pekerjaan yang besar juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia Peran Pemerintah punya

keharusan menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dimana bunyinya “*bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Dengan demikian Pemerintah bertanggung jawab guna meminimalisir, mengatasi, serta menangani masalah sehubungan dengan pengangguran.

Salah satu indikator penting guna melakukan pengukuran kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah ialah tingkat pengangguran. Sebab jika pengangguran masih tinggi maka kesejahteraannya rendah. Bagi negara yang punya jumlah penduduk banyak seperti Indonesia, indikator ini kemudian menjadi begitu penting. Karena, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak ialah sasaran utama dalam

pembangunan daerah supaya sifatnya sangat strategis. (Sjafrizal 2017:176–77)

Melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah punya kewajiban guna menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada hingga saat ini. Dalam pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) menjelaskan (1) tenaga kerja yang diberdayakan dan digunakan secara optimal menjadi tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan, (2) pembangunan nasional serta daerah agar terwujud maka, dibutuhkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang merata, (3) kesejahteraan diwujudkan ke dalam bentuk pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja dan (4) kesejahteraan keluarga pekerja dan dirinya sendiri harus ditingkatkan.

Permasalahan Ketenagakerjaan masih terus berlanjut di awal tahun 2020, penyebaran virus baru terjadi di seluruh penjuru dunia yakni *virus disease-19*. Negara Indonesia juga mendapatkan serangan *virus disease-19* yang muncul dari wilayah Wuhan, China. *Virus disease-19* ini telah menjalar ke seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. *Virus disease-19* ini disebut Pandemi Covid-19. Akibat dari pandemi Covid -19 Indonesia mengalami dampak negatif yang muncul yakni meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Ada empat kelompok yang terdampak Covid-19 yakni ;

1. Pengangguran karena Covid-19
2. Penduduk yang pernah berhenti kerja saat Februari – Agustus 2020 disebut Bukan Angkatan Kerja (BAK)
3. Dirumahkan ialah istilah bagi pekerja yang diberhentikan sementara, dan
4. Pengurangan jam kerja terhadap pekerja.

Pada bulan Agustus 2020 angka pengangguran di Indonesia sebanyak 29,12 juta orang yang tercatat oleh BPS. Data terbagi atas beberapa kategori secara beragam yang terbagi dalam beberapa kategori seperti, pengangguran disebabkan Covid -19 sejumlah 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau penduduk usia kerja sebanyak 0,76 juta orang, sedangkan tidak bekerja karena

Covid-19 sejumlah 1,77 juta orang, dan yang terakhir kerja nam`un dikurangin jam kerjanya (*shorter hours*) disebabkan Covid -19 sejumlah 24,03 juta orang. (BPS 2020). Angka pengangguran per Agustus 2020 meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh pandemi Covid -19 yang kita hadapi hingga saat ini. (BPS 2020).

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ialah indikator yang dipakai guna melakukan pengukuran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja serta menunjukkan serapan tenaga kerja. Menurut hasil Sakernas Agustus 2020 TPT sebesar 7,07 persen. Ini artinya, dari 100 orang angkatan kerja akan ada sekitar tujuh orang pengangguran. Serta, di Agustus 2020, peningkatan yang cukup besar terjadi pada TPT yakni sejumlah 1,84 persen poin tidak sebanding dengan Agustus 2019. Jika dilihat dari TPT menurut jenis kelamin, TPT laki-laki sejumlah 7,46 persen, TPT perempuan berjumlah 6,46 persen. Persentase yang mengalami kenaikan selama Agustus yaitu 2,22 persen, serta perempuan 1,24 persen.

Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam juga merasakan akibat pandemi Covid-19. Merupakan kota yang dikenal dengan kota industri, bentuk Kota Batam juga merasakan dampak negatif dari adanya serangan Covid 19 ini. Berdasarkan data BPS Kota Batam per Agustus 2020 jumlah pengangguran tercatat sebanyak 87.903 orang, berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah pengangguran sebanyak 57.602 orang. Angka pengangguran di masa Covid-19 meningkat secara signifikan. (BPS Batam 2020).

Menurut Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Dan Penempatan Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Bapak Hendri,S.H., beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19. Pertama, kurang maksimalnya upaya guna menyelesaikan masalah pengangguran dikarenakan anggaran yang terbatas. Selain itu, anggaran yang terbatas juga menyebabkan penyebaran informasi terkait pasar kerja menjadi

terbatas pula. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penempatan yang terbatas terutama pengantar kerja tidak ada mengakibatkan pelayanan kurang maksimal. Ketiga, pengusaha juga memiliki kesadaran yang kurang dalam melakukan wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Dan keempat, terbatasnya petugas Dinas Tenaga Kerja untuk turun ke lapangan terkait dampak dari Covid-19.

Berdasarkan pemaparan yang di uraikan diatas maka, judul penelitian yang akan di lakukan adalah Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Pada Masa Covid-19 Di Kota Batam.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peranan dikenal dalam bahasa Inggris "*Role*" tentang terminologi "peranan" antara lain dapat ditemui penggunaannya sebagai berikut (Domai 2010) :

1. Figur atau tokoh
2. Keaktifan atau partisipasi
3. Kedudukan atau posisi
4. Role atau peranan diartikan juga sebagai cara-cara bertindak, tingkah laku, serangkaian sikap yang oleh suatu fungsi atau jabatan tertentu diharapkan dari sekarang.

Menurut Levinson dalam buku (Soerjono Soekanto 2017:211) syarat peran mencakup 3 hal, pertama Cangkupan peran ialah norma yang berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat. Peran ialah rangkaian aturan yang memberi seseorang bimbingan pada kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan ialah sebuah konsep mengenai apa yang bisa dilaksanakan antara masyarakat dengan individu suatu organisasi. Ketiga, peranan ialah hal penting sebagai tingkah laku individu untuk struktur sosial masyarakat.

Menurut Zaenal Mukarom (Zaenal Mukarom 2018:192) peran posisi *public relations* ialah menjaga serta membangun relasi yang tak hanya baik namun juga memberi manfaat antara organisasi dengan publik yang berpengaruh pada tujuan organisasi. Setiap peranan punya tujuan supaya

individu dalam menjalankan peranannya dengan orang di sekitarnya agar bisa diterima individu lain sehingga relasi yang harmonis bisa tercipta. Melalui uraian di atas kita bisa menyimpulkan jika peran ialah sebuah tindakan yang bisa memberi batasan pada organisasi atau individu guna melaksanakan sebuah aktivitas menurut ketentuan yang bersama-sama disepakati.

2.2 Indikator Peran Pemerintah

Menurut musgrave terdapat 3 (tiga) peran/ fungsi pemerintahan (Domai 2010:25–26) sebagai berikut :

1. Alokasi, merupakan sebagai fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik.
2. Distribusi, merupakan upaya pemerintah dalam skripsi kan produk-produk yang dihasilkan oleh konsumen.
3. Stabilisasi, merupakan upaya pemerintah dalam memastikan perekonomian ada dalam full employment (kesempatan kerja) dan mengupayakan keseimbangan harga-harga perekonomian agar tetap stabil

Menurut Soeharto (Suharto 2014:110) yang mengemukakan 5 (lima) dimensi peran dan dapat dijadikan sebagai indikator dalam peran Dinas Tenaga Kerja ialah :

1. Peran Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial ialah seperangkat aturan, sistem dan mekanisme yang bisa memberi arahan pada berbagai tujuan pembangunan. Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang orientasinya pada tujuan publik.
2. Peran Strategi
Perumusan strategi untuk program-program pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan prinsip SMART. Prinsip ini bermakna "cerdas" secara harafiah. SMART adalah *Spesifik*, ialah prinsip yang terfokus dan khusus. *Measurable*, yakni prinsip yang terukur. *Achievable*, ialah prinsip yang dapat dicapai. *Realistic*, yakni prinsip yang nyata dan sesuai dengan yang ada. *Time-bound* ialah prinsip yang memiliki batasan waktu yang jelas.
3. Peran Komunikasi

Saat merumuskan keputusan maupun kebijakan, alat yang dapat dipergunakan agar informasi didapatkan ialah sebuah komunikasi. Alat ini dirancang sedemikian baik untuk proses pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui informasi terbaru dari bagian pelayanan pemerintahan. Pemerintah juga menggunakan komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki peluang dalam kesejahteraan masyarakat. Komunikasi dibuat dalam bentuk formal dan nonverbal sehingga preferensi masyarakat dapat bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.

4. Peran Mediator (Penyelesaian Sengketa)

Menurut Compton dan Galaway dalam (Suharto 2014:101) kapabilitas dan teknik dipergunakan dalam memerankan pihak mediator yaitu pencarian kemiripan yang ada dari pihak berkonflik, mengarahkan pihak yang berseberangan untuk pengakuan atas kepentingan pihak lain, melakukan identifikasi kepentingan bersama, menghindari sikap yang berkeinginan kondisi menang atau kalah, membangun komunikasi yang harmonis dengan setiap pihak.

5. Peran Terapi (Penyembuhan Sosial)
Dalam mengemban sebagai peran pemerintah para Aparatur Negara dibekali ilmu serta metode penyembuhan sosial (*social treatment*). Terapi sosial ini antara lain terapi kelompok (*group work*), terapi individu (*case work*), manajemen pelayanan kemanusiaan (*human service management*), analisis kebijakan sosial (*social policy analysis*), serta terapi masyarakat (*community development*). Terapi-terapi tersebut tersusun dengan sistematis dalam metode terapi sosial.

2.3 Dinas Tenaga Kerja

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Tenaga Kerja termasuk ke dalam aturan Walikota Batam Nomor 46 tahun 2016. Kepemimpinan, kontrol, perumusan, pembinaan, pengendalian,

koordinasi serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan teknis merupakan tugas pokok yang tercantum pada pasal 3 ayat 2. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berfungsi sebagai (Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 2019) :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis,
- 2) Menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan pemerintahan,
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan, serta
- 4) Melaksanakan, monitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan dinas.

2.4 Pengangguran

Menurut Mariani dalam (Mariani 2013) keadaan angkatan kerja (*labor force*) yang tidak punya pekerjaan serta tidak aktif mencari kerja dikatakan sebagai pengangguran. Pada bulan Agustus 2020 angka pengangguran di Indonesia sebanyak 29,12 juta orang yang tercatat oleh BPS. Data terbagi secara beragam yang terbagi dalam beberapa kategori seperti, pengangguran disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejumlah 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau penduduk usia kerja sejumlah 0,76 juta orang, sedangkan yang tak bekerja sejumlah 1,77 juta orang, dan yang terakhir kerja namun dikurangi jam kerjanya (*shorter hours*) disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejumlah 24,03 juta orang. Angka pengangguran per Agustus 2020 meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang kita hadapi sampai kini (BPS 2020).

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Ada 4 (empat) faktor berdampak bagi implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam Nugroho yakni komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur organisasi (Rusdin Nawi 2017:60–70). Implementasi kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja. Adapun uraian 4 (empat) faktor adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi ialah pelaksanaan kebijakan harus memiliki sifat konkrit dan spesifik dalam suatu keputusan sesuai dengan intruksi agar terhindar dari diskomunikasi. Jenis komunikasi

berpengaruh atas kesalahpahaman (*misunderstanding*), hal ini beresiko terhadap kebijakan menjadi kurang efektif. Komunikasi juga menjadi faktor penentu bagi suatu kebijakan. Menjadi penyebarluasan informasi baik dari komunikasi bawah ke atas, dari atas ke bawah, maupun secara horizontal. Hal ini merupakan acuan penentu keberhasilan dalam suatu lembaga organisasi.

2. Sumber Daya

Sumber Daya mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah dari kegiatan kebijakan pembangunan setiap kegiatan sumberdaya perlu transparansi, mempertanggungjawabkan dalam mengembangkan suatu aktivitas sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya aset, dan sumber daya keuangan harus dipertanggungjawabkan.

3. Disposisi

Bentuk kesiapan dari semua elemen organisasi guna menggelar kebijakan disebut dengan disposisi. Menurut Soebarsono (2005) berpendapat jika pengertian disposisi yakni karakteristik serta watak yang aparatur punyai guna persiapan untuk melaksanakan kebijakan sesuai harapan pembuat kebijakan.

4. Struktur Organisasi

Menurut Stephen P Robbins (2006) struktur organisasi mencakup; formalisme, desentralisasi, sentralisasi, rentang kendali, rantai komando, departementasi, dan spesialisasi kerja (Rusdin Nawi 2017:67).

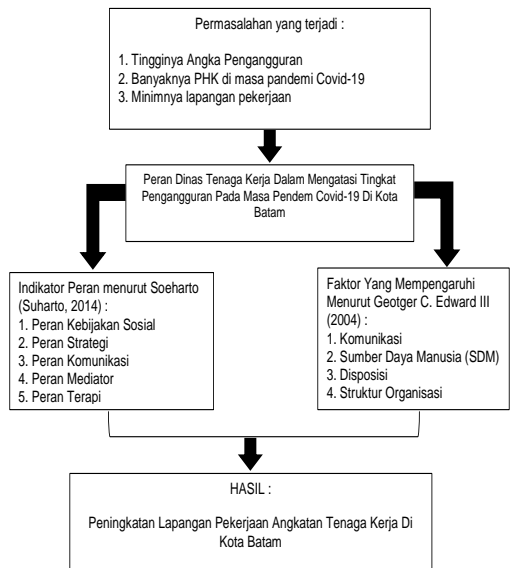
2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang diteliti oleh (Riyanda dan Dula 2020) (Harahap 2019) berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Terhadap Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Hasil riset menyatakan jika penerapan MEA pada sektor Ketenagakerjaan dan melakukan deskripsi atas strategi perencanaan yang Dinas Tenaga Kerja Kota Batam rancang guna peningkatan

kompetensi tenaga kerja pada era MEA juga melakukan pemetaan berbagai faktor yang menghambat pembangunan ketenagakerjaan yang Dinas Tenaga Kerja Kota Batam alami.

Penelitian yang diteliti oleh (Ruru 2017) berjudul Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Dari riset yang digelar diperoleh jika peran Bappeda begitu Kompleks guna melakukan perencanaan pembangunan daerah. Ini berarti Bappeda menangani segala bidang perencanaan pembangunan dan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan (Bayu Prasetyo Mariono, Michael Mantiri 2017) berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Minahasa. Hasil berupa kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah bagus menurut riset di Dinas Tenaga Kerja ataupun pada masyarakat. Meskipun tingkat pengangguran di kabupaten Minahasa meningkat per tahun, dimana pada 2014 sejumlah 13.584 orang dan tahun 2015 sejumlah 14.513 orang.



2.7. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber : Data Penelitian 2021)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dilakukan peneliti guna menghasilkan data valid maka, peneliti melakukan berbagai tahapan hingga sampai ke simpulan penelitian ditemukan. Peneliti mencari informasi data yang akurat dan lengkap sesuai dengan tujuan utama penelitian. Kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan, metode ini bekerja untuk mengulik kebenaran, metode ini termasuk sebagai riset ilmiah yang beralaskan teori dan data empirik. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama dengan 6 (enam) narasumber yang berasal dari 3 (tiga) Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan 3 (tiga) dari masyarakat yang turut serta dalam program-program kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi langsung ke lokasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan ke rumah-rumah masyarakat dengan melakukan wawancara serta dokumentasi foto. Peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data disajikan secara rapi dan tersusun sehingga memudahkan untuk dipahami. Melakukan penarikan kesimpulan secara kompleks dan didukung dengan data-data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yakni, terciptanya hubungan industrial harmonis dapat terjadi dengan cara menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Serta Misi Disnaker Kota Batam yakni, pelatihan yang tersedia berguna untuk peningkatan kapabilitas tenaga kerja dalam pemenuhan kebutuhan pasar kerja, peningkatan pembinaan serta penempatan kerja, peningkatan pelaksanaan pembinaan hubungan

industrial, menyelesaikan perselisihan serta peningkatan kepatuhan hukum, melayani dengan Prima melalui sarana dan prasarana perkantoran yang lengkap serta sumber daya manusia berkapabilitas. Tugas pokok dan fungsi Disnaker Sesuai dengan peraturan Walikota Batam No. 46 tahun 2016 perihal Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja yakni, memiliki tugas pokok mengimplementasikan program Pemda atas dasar otonomi serta tugas pelayanan dibidang Ketenagakerjaan daerah berdasarkan wewenang yang dimandatkan. Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yakni :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pada sektor ketenagakerjaan.
- b. Menyelenggarakan program pemerintah serta melayani di sektor ketenagakerjaan.
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ketenagakerjaan, serta
- d. Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan dinas.

4.2. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Pada Masa Covid-19 Di Kota Batam

Peran Disnaker Kota Batam guna pemberantasan pengangguran pada masa Covid-19 dapat ditelisik berdasarkan capaian yang telah dilakukan. Penilaian terhadap peran dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 berdasarkan indikator dimensi peran menurut Suharto yaitu peran kebijakan sosial, peran strategi, peran komunikasi, peran mediator, (penyelesaian sengketa), dan peran terapi (penyembuhan sosial) (Suharto 2014)

a. Peran Kebijakan Sosial

Dinas Tenaga Kerja dalam membuat kebijakan untuk mengatasi pengangguran pada masa Corona di kota Batam berorientasi pada tujuan publik. Hal tersebut diketahui setelah melihat berbagai program kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Wawancara dari bapak Hendri, S.H.,

sebagai Kasi Informasi Pasar Kerja Dan Penempatan Dalam Negeri, Ibu Yusbawati, S.E., M.M., sebagai Kasi Penempatan TKI Luar Negeri Dan TKA, serta Ibu Novarastami, S.I.P., selaku mediator pada Jabatan Fungsional mengatakan hal yang sama yaitu ada beberapa program kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 Kota Batam.

Peranan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 bertujuan untuk pencarian, pengalokasian serta pengembangan sumber daya manusia sehingga kesejahteraan serta keadilan sosial dapat tercapai. Harapan masyarakat bahwa Dinas Tenaga Kerja dapat mengatasi masalah pengangguran pada masa Covid-19. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja memiliki peran kebijakan sosial dalam mengatasi pengangguran pada masa 19 agar tercapainya target sebelumnya.

b. Peran Strategis

Peran Disnaker dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 dibantu juga dengan dunia industri Oleh berbagai perusahaan yang ada di Kota Batam. Beberapa informan yang penulis datangi mengemukakan keterangan yang demikian. Peserta yang mengikuti pelatihan *Fitter* yaitu Rama juga mengatakan bahwa program kebijakan dari Disnaker dalam mengatasi pengangguran Pada masa Covid-19 yaitu dengan pelatihan keterampilan sehingga ada penambahan wawasan yang diaplikasikan ke pekerjaan.

c. Peran Komunikasi

Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan peran komunikasi dengan menyebarkan informasi secara online melalui website dan akun resmi.

Selain itu Dinas Tenaga Kerja juga melibatkan para pengusaha dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam penyebaran informasi. Hal ini sesuai dengan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Komunikasi juga sangat berguna perihal informasi lowongan kerja sebab komunikasi yang ada akan memudahkan dalam mencari informasi informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat bagi para pencari lapangan pekerjaan dan peluang mensejahterakan hidup sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

d. Peran Mediator (Penyelesaian Sengketa)

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini adalah membantu pihak-pihak yang sedang berkonflik dan melakukan diagnosa permasalahan yang sedang terjadi hingga diagnosis permasalahan tersebut dapat mencapai penyelesaian masalah. Selain itu, fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah mengurangi masalah dan meredam konflik melalui pendapat dari masing-masing pihak.

e. Peran Terapi (Penyembuhan Sosial)

Dalam mengemban sebagai peran pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dibekali ilmu dan metode penyembuhan sosial (*social treatment*) yang umumnya meliputi terapi masyarakat dan analisis kebijakan sosial yang dibangun secara sistematis dari strategi dalam metode penyembuhan sosial. Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan peran terapi (penyembuhan sosial) dengan memberikan terapi kepada masyarakat berupa program-program seperti pelatihan keterampilan dan sertifikasi. Keterampilan dan sertifikat yang didapat berguna untuk mencari pekerjaan. Namun masih ada kekurangan dalam hal komunikasi

dengan pengguna tenaga kerja. Masih banyak terdapat perusahaan yang hanya menerima tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman kerja.

4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Pada Masa Covid-19 Di Kota Batam

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 Di Kota Batam Ada 4 (empat) faktor berdampak bagi implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam Nugroho yakni komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur organisasi (Rusdin Nawi 2017:60).

1. Komunikasi

Agar kebijakan dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam dapat berjalan efektif, dinas tenaga kerja yang telah ditugaskan dalam bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengetahui benar-benar apa yang akan dikerjakan dengan baik dan benar. Dalam menyampaikan suatu informasi mengenai pembangunan harus dikomunikasikan secara transparan. Dengan orientasi tujuan yang jelas mengarahkan lebih kreatif dan lebih fokus pada konsistensi komunikasi yang mendukung kebijakan dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam di terapkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja menjalankan peran dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam masih kekurangan personil di bidang perluasan kerja komunikasi. Hal ini menyebabkan tidak ada respon berupa jawaban kepada masyarakat pada media sosial Dinas Tenaga Kerja. Sehingga menyebabkan komunikasi antara dinas tenaga kerja dengan masyarakat belum efektif.

2. Sumber Daya

Dinas tenaga kerja dalam melakukan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam hal mengatasi tingkat pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam masih kekurangan jumlah personil. Sumber daya ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menjalankan program kebijakan Dinas. Tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dijalankan dari adanya kesiapan sumber dayanya. Sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja tidak sebanding dengan besarnya cakupan kerja dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi, karena tanpa ada personil yang mencukupi dan tepat, maka suatu organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang masih kekurangan sumber daya khususnya jumlah personil, karena beban dan tanggung jawab yang dikerjakan tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Melihat kondisi seperti ini kedepannya ada penambahan personil untuk melakukan tugas secara menyeluruh.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai bentuk kesiapan dari seluruh elemen dinas tenaga kerja untuk menjalankan kebijakan dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam. Pentingnya faktor disposisi atau perilaku memegang pengaruh terhadap kegiatan kebijakan pemerintah yang secara substantif mendukung psikologi dalam berperilaku menyikapi suatu kebijakan. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 sudah melakukan yang terbaik. Namun, terkendala akibat pandemi beberapa program tidak dapat terlaksana.

4. Struktur Organisasi

Keberadaan faktor struktur organisasi tidak dapat dihindari Karena pada

dasarnya suatu kebijakan yang dijalankan berasal dari perumusan suatu organisasi, karena itu keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh struktur organisasi yang mengembangkan dan memperbaiki bentuk-bentuk formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Struktur organisasi yang menjadi suatu bagian dari pengembang, pengkoordinasi, perencana dan pengendali suatu kegiatan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja melakukan pekerjaan berdasar asas pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggungjawab berdasarkan keahlian masing-masing bidang.

SIMPULAN

Hasil riset penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan ialah, peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi tingkat pengangguran pada masa Covid-19 sudah baik namun belum maksimal. Dari uraian setiap bab diatas simpulan yang diperoleh adalah :

1. Dinas Tenaga Kerja telah berusaha untuk mengatasi tingkat pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam melalui program-program kebijakan, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya personal sumber daya manusia di Dinas.
2. Dinas Tenaga Kerja melakukan penempatan tenaga kerja dengan pelayanan mendata para calon tenaga kerja yang ingin mencari kerja lewat informasi pasar kerja. Calon tenaga kerja ini mendaftar sesuai formulir kartu pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja menjadi penengah antara Tenaga Kerja dan perusahaan sebagai mediator.
3. Pelatihan keterampilan tenaga kerja dapat dikatakan program yang dapat meningkatkan kualitas dari tenaga untuk bersaing dalam dunia industri dan usaha.
4. Kendala-kendala untuk menjamin peran dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19 di Kota Batam yaitu,

kurangnya sumber daya manusia sehingga dinas tenaga kerja tidak bisa merespon pertanyaan dari masyarakat pada website dan akun resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Prasetyo Mariono, Michael Mantiri, Frans Singkoh. 2017. "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Eksekutif* 2(2).
- BPS. 2020. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020." *BPS* 23. Diambil (file:///C:/Users/hp/Downloads/BRS brsInd-20210219093351_rev.pdf).
- BPS. 2021. "Sensus Penduduk 2020." 2020 8. Diambil (file:///C:/Users/hp/Downloads/BRS brsInd-2021021150846.pdf).
- BPS Batam. 2020. "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Batam 2020." *Badan Pusat Statistik* (86):2. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. 2019. "Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 2019." Diambil (<https://disnaker.batam.go.id/profil/profil-disnaker-2018/>).
- Domai, Tjahjulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Cetakan Pe. diedit oleh UB Press. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, Erfina Noviyanti. 2019. "Pembimbingan Dan Pembinaan Bkkbn Dalam Bidang Keluarga Berencana Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7(2):128.
- Mariani. 2013. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat." *Administration Journal* 1–54.
- Riyanda, Riko dan Atanasius Dula. 2020. "Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Terhadap Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)." *Menara Ilmu* XIV(02):83–93.
- Ruru, Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Joorie M. 2017.

- “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* 4(48).
- Rusdin Nawi. 2017. *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Cetakan 1. diedit oleh Syamsuddin Maldun. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Sjafrizal. 2017. *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI*. Ed. 1 Cet. diedit oleh octiviena. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 48 ed. diedit oleh Embuntur. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan ke. diedit oleh Aep Gunarsa. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Zaenal Mukarom. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. ke-2. diedit oleh Beni Ahmad Saebeni. Bandung: CV Pustaka Setia.